

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari :	Diterima tgl :
	Waktu : Pukul WIB
	No. Agenda :
No. Surat :	Sifat
Tgl. Surat :	<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Hal :	

Diteruskan Kepada Yth Sdr :

- ☐ Sekretaris Ditjen Bina KEUDA
- ☒ Dir. Perencanaan Anggaran Daerah
- ☐ Dir. Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Keuda
- ☐ Dir. Pendapatan Daerah
- ☐ Dir. Fasilitasi Dana Perimbangan & Pinjaman Daerah
- ☐ Dir. BUMD, BLUD & Barang Milik Daerah

Disposisi

- ☐ ACC / laksanakan
- ☒ Proses Lebih Lanjut
- ☐ Tanggapan dan saran
- ☐ Laport dan bicarakan bersama
- ☒ Koordinasi / Konfirmasikan
- ☐ Siapkan bahan
- ☐ Jadwalkan
- ☒ Wakili
- ☐ Dampingi
- ☐ Monitor
- ☐ Koreksi / Sempurnakan
- ☐ UMP
- ☐ File / Simpan

Catatan :

Jakarta,

16/9



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telp (0721) 252300, 254641, 254706
BANDAR LAMPUNG, 35214.

Bandar Lampung, 15 September 2020

Nomor : 900 / 1017 / IV-02 / 2020
Lamp. : 1 (satu) lembar
Perihal : Uji Coba Integrasi Sistem

Kepada Yth :

TERLAMPIR

di -

Tempat

UNDANGAN

Dengan ini diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat koordinasi melalui zoom meeting, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 17 September 2020

Waktu : 09.30 s/d Selesai

Joint Zoom Meeting : <https://us02web.zoom.us/j/85059837866?pwd=WHlyWmlyZ3ByWUxmZWlRWMGJjdUNxUT09>

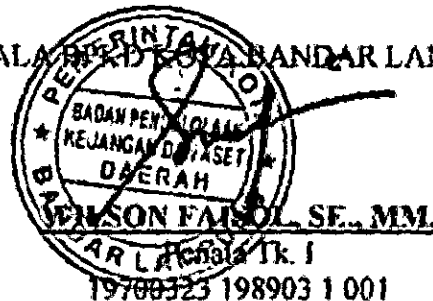
Meeting ID : 850 5983 7866

Passcode : 363590

Acara : Uji Coba Integrasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIAP BMD) dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIBANGDA) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKEUDA)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BANDAR LAMPUNG,



DAFTAR NAMA UNDANGAN

1. Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Provinsi Banten
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Provinsi Lampung
6. Ketua Satuan Tugas Korsupgah KPK-RI Wilayah III
7. Ketua Satuan Tugas Korsupgah KPK-RI Wilayah IV
8. Pemerintah Kota Cilegon
9. Pemerintah Kota Tangerang
10. Pemerintah Provinsi Banten
11. Pemerintah Kota Batam
12. Pemerintah Kota Palembang
13. Pemerintah Provinsi Lampung
14. Pemerintah Kota Metro Lampung
15. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
16. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
17. Pemerintah Provinsi Banten
18. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
19. Pemerintah Kota Sukabumi
20. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
21. Pemerintah Kabupaten Mojokerto
22. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
23. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
24. Pemerintah Kota Banjarbaru
25. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
26. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
27. Pemerintah Kabupaten Lembata
28. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
29. Pemerintah Kabupaten Baubau
30. Pemerintah Kabupaten Pesawaran
31. Pemerintah Kota Ternate
32. Pemerintah Kabupaten Prabumulih